

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DI KELURAHAN TANJUNGPINANG TIMUR KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG

Oleh
Azahra Ashilah
NIM. 2205010022

ABSTRAK

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, merupakan salah satu instrumen partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta mengacu pada teori partisipasi Sulaiman (dalam Huraerah, 2008) dan ketentuan normatif dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan Musrenbang telah mengikuti mekanisme berjenjang dan pendekatan partisipatif (*bottom up*) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Namun, pada tataran implementasi terdapat ketidaksesuaian antara desain partisipatif dengan praktik di lapangan. Pada tingkat pemerintah, partisipasi cenderung dimaknai sebagai pemenuhan aspek administratif dan keterwakilan struktural melalui mekanisme berjenjang. Sebaliknya, masyarakat memaknai partisipasi sebagai keterlibatan langsung, keterbukaan akses informasi, serta tersedianya ruang deliberasi yang nyata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Musrenbang belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang partisipasi deliberatif, melainkan masih berada dalam kerangka partisipasi yang bersifat prosedural. Diperlukan upaya transformasi mekanisme partisipasi yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga memperkuat dimensi deliberasi, transparansi, serta distribusi kekuasaan dalam proses perencanaan pembangunan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Musrenbang, Perencanaan Pembangunan, Deliberatif

**ANALYSIS OF COMMUNITY PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT
PLANNING FORUM IN TANJUNGPINANG TIMUR VILLAGE BUKIT
BESTARI DISTRICT TANJUNGPINANG CITY**

By

Azahra Ashilah

NIM. 2205010022

ABSTRACT

The Development Planning Consultation (Musrenbang) in Tanjungpinang Timur Village, Bukit Bestari Subdistrict, Tanjungpinang City, is one of the participatory instruments in the regional development planning process. This study aims to analyze the dynamics of community participation in the Musrenbang using a qualitative descriptive method, drawing on Sulaiman's theory of participation (as cited in Huraerah, 2008) and the normative provisions of Ministry of Home Affairs Regulation No. 86 of 2017. The research findings indicate that, normatively, the implementation of Musrenbang has followed the tiered mechanism and participatory (bottom-up) approach as stipulated in Ministry of Home Affairs Regulation No. 86 of 2017. However, at the implementation level, there is a discrepancy between the participatory design and on-the-ground practices. At the government level, participation tends to be interpreted as fulfilling administrative requirements and structural representation through a tiered mechanism. Conversely, the public interprets participation as direct involvement, open access to information, and the availability of a genuine space for deliberation. These findings indicate that the Musrenbang has not yet fully functioned as a space for deliberative participation but remains within a framework of procedural participation. Efforts are needed to transform participation mechanisms so that they are not only oriented toward fulfilling administrative requirements but also strengthen the dimensions of deliberation, transparency, and the distribution of power in the development planning process.

Keywords: Community Participation, Musrenbang, Development Planning, Deliberative